

Konstruksi Kuasa Presiden Jokowi dalam Pidato “Indonesia Darurat Corona”

^{1)Patricia Robin;}^{2)Gabriela Priscila}

^{1) & 2) Universitas Bunda Mulia}

^{1) patrobin23@gmail.com; ^{2) gabriela.priscila1606@gmail.com}}

Article Information

Submitted :
August 13rd,
2020

Accepted : March
25th, 2021

Abstract

The Covid-19 outbreak is a turning point in our daily life. The aspects of personal and social life have changed, working hours have become longer, and media use has become more patterned. This is a new policy and decision from the Government. This study uses Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis to uncover the text of President Joko Widodo's speech which is closely related to elements of power in a massive and cooperative scope. This discussion covers the aspects of the microstructure discourse discussing representation, relationships, and identity; meso-structural discourse analysis, which is closely related to production, consumption, and the study of unbalanced power; observing with discourse analysis macrostructure (sociocultural) that looks at the situational, institutional, and social aspects. President Jokowi responded to public unrest regarding the handling of the epidemic and the economy, and showed that the government had made efforts and prepared scenarios for all possibilities. Through this speech, President Jokowi also responded to the assumptions of his leadership which were less firm and the many inconsistencies between the central and regional governments with the policy regarding PSBB. The main concern of researchers is the choice of words used by President Jokowi in delivering speeches. It becomes a concern when a decision determined by the government seems to be the only show.

Keywords: Norman Fairclough; President Jokowi's speech; Power of Foucault; social distancing

Abstrak

Wabah Covid-19 merupakan titik balik kehidupan manusia. Segi kehidupan pribadi dan sosial berubah, waktu bekerja menjadi lama, dan pemilihan penggunaan media menjadi lebih terpola. Hal ini memunculkan kebijakan dan keputusan baru dari Pemerintah. Penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk membongkar teks pidato Presiden Joko Widodo yang lekat dengan unsur kekuasaan dalam lingkup massif dan kooperatif. Adapun pembahasan ini melingkupi segi wacana mikrostruktur membahas representasi, hubungan, dan identitas; analisis wacana mesostruktur, yang erat dengan produksi, konsumsi, dan reproduksi teks kekuasaan yang tidak seimbang; dilanjutkan dengan analisis wacana makrostruktur (sosiokultural) yang melihat dari aspek situasional, kelembagaan, dan sosial. Presiden Jokowi menjawab keresahan masyarakat mengenai penanganan wabah dan perekonomian, serta menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan usaha-usaha dan menyiapkan skenario-skenario untuk segala kemungkinan. Melalui pidato ini, Presiden Jokowi sekaligus merespon asumsi kepemimpinannya yang kurang tegas dan banyaknya ketidaksiharian antara pusat dan daerah dengan menegaskan kebijakan mengenai PSBB. Perhatian utama peneliti adalah pada pemilihan kata yang digunakan oleh Presiden Jokowi dalam penyampaian Pidato. Menjadi perhatian ketika sebuah keputusan yang ditetapkan oleh pemerintahan seakan menjadi pertunjukkan satu orang semata.

Kata kunci: Norman Fairclough; Pidato Presiden Jokowi; Kekuasaan Foucault; PSBB

PENDAHULUAN

Tahun 2020 digemparkan dengan munculnya wabah yang menyerang dunia secara massif. Covid-19 merupakan penyakit disebabkan corona virus yang baru ditemukan ketika terjadi wabah di Wuhan, Desember 2019. Berbeda orang, berbeda pula wujud virus ini, ada yang bergejala, ada yang tidak. Gejala yang paling umum terjadi adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering hingga rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare yang dialami secara ringan dan bertahap. 80% pasien yang terinfeksi dapat pulih tanpa perawatan khusus, tetapi hal ini berbeda dampak bagi mereka yang lansia dan sebelumnya sudah memiliki penyakit seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes (WHO, 2020)¹

Beberapa saran perlindungan diri digalakkan demi mengurangi infeksi dan penyebaran Covid-19, seperti sering mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari menyentuh mata, telinga dan hidung, menerapkan etika batuk dan bersin, dan yang paling utama adalah tetap tinggal di rumah atau tempat aman supaya tidak beresiko terkena virus ini. Larangan yang berada dalam sanksi ringan hingga sanksi berat pun dilakukan di seluruh dunia.

Negara Eropa yang sudah terjangkit virus ini terlebih dahulu, memberlakukan sistem *full lockdown* yaitu penguncian penuh, dimana setiap orang harus tinggal di tempat mereka berada dan tidak boleh masuk atau keluar dari sana, kecuali untuk hal yang diizinkan. Salah satu negara, yaitu Italia melakukan *lockdown* dengan menutup sekolah, gimnasium, museum, klub malam dan tempat-tempat lain di seluruh negeri dan memberikan kesempatan hanya bagi toko kelontong dan apotek untuk memberikan pelayanan kebutuhan sehari-hari dan kesehatan. *Lockdown* ekstrim yang dilakukan juga adalah memisahkan orang lanjut usia di seluruh negeri dari keluarga atau siapapun dengan tujuan mencegah penularan. Warga yang menentang aturan menghadapi hukuman tiga bulan penjara atau denda sekitar 230 dolar AS. Negara-negara yang menerapkan *lockdown* mampu mengendalikan penyebaran virus corona jenis baru dan menekan jumlah kasus infeksi secara signifikan bahkan mencegah kematian dini hingga lebih dari 1.500 jiwa (Putsanra, 2020)².

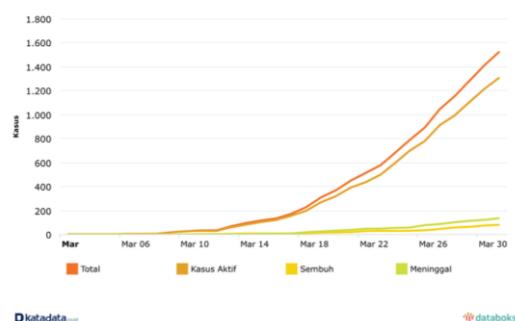
Indonesia adalah salah satu negara yang terjangkit Covid-19, setelah serangan virus terjadi pada akhir tahun 2019 di Negara Cina. Indonesia baru mengumumkan kasus 01 pada 2 Maret 2020, yaitu seorang wanita yang melakukan kontak dengan warga negara asing. Perlahan tapi pasti, Covid-19 menggerogoti kestabilan negara di segala sektor dan mencapai angka fantastis 1.528 kasus per 31 Maret 2020. Hal ini yang akhirnya membuat pemerintah akhirnya mengambil tindakan untuk mengeluarkan aturan yang diharapkan efektif dalam mengurangi penyebaran dan memaksimalkan pengobatan terhadap individu yang terjangkit.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Presiden Jokowi) sebagai pemimpin negara tidak tinggal diam, melainkan mengambil tindakan. Dalam hal ini tergambarkan dengan jelas bahwa di semua negara dan pemerintahan, diskusi tentang kekuasaan adalah hal menarik yang bahkan sudah muncul sejak Yunani kuno. Filsuf klasik mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan; pemikir religius menghubungkan kekuasaan dengan Tuhan; sementara dalam dunia politik sebagai alat mengabdikan tujuan negara yang dianggap agung dan mulia. Secara internasional, pengelolaan kekuasaan merupakan isu yang selalu terbaharui selama umat manusia terus menemukan cara bagaimana menyeimbangkan kekuasaan. Jika distribusi kekuasaan seimbang, maka keamanan internasional otomatis akan bisa dijamin. Keseimbangan distribusi kekuasaan adalah cita-cita semua bangsa (Sheehan, 1996)³.

Gambar 1.1. Perkembangan Kasus Corona RI per 31 Maret 2020

**Perkembangan Terkini Kasus Corona di Indonesia
(Selasa, 31/3)**

Pasien yang terinfeksi virus corona (Covid-19) bertambah menjadi 1.528 orang hingga 31 Maret 2020. Peningkatan juga terjadi pada pasien yang sembuh menjadi 81 orang dan pasien yang meninggal sebanyak 136 orang. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menangani Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi. Dalam Perppu tersebut, Jokowi menginstruksikan agar ada tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun (Baca: Daftar Negara Paling Rentan Covid-19, Indonesia Nomor 2)



(Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Katadata, 2020)⁴

Menjalankan dengan maksimal fungsi sebagai lembaga eksekutif negara, Presiden Jokowi menunjukkan kekuasaannya dengan mengambil keputusan dan menerapkan aturan kenegaraan. Hal ini menunjukkan posisi dirinya sebagai Presiden yang dilegitimasi secara metafisis yang memungkinkan negara mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Michael Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara ataupun terfokus pada sesuatu yang dapat diukur. Dia tidak menguraikan apa itu kuasa, tetapi bagaimana kuasa itu berfungsi pada bidang tertentu. Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. (Bertens, 2001)⁵.

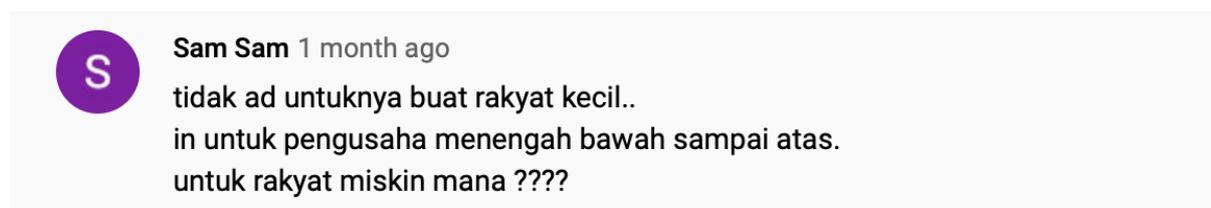
Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan wartawan dalam sebuah keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat yang disiarkan melalui *channel* Youtube Sekretariat Presiden dan ditayangkan stasiun televisi nasional. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa Pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko dan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, ia memutuskan dalam Rapat Kabinet bahwa opsi yang dipilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sesuai undang-undang (UU), PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan Kepala Daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan⁶.

Presiden Jokowi mengedepankan pembahasan kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, penjagaan dunia usaha dan penyerapan tenaga kerja yang di dalamnya terdapat butir mengenai pembagian sembako hingga keringanan pembayaran kredit, serta kepastian menggelontorkan tambahan belanja dan APBN 2020 sebesar 405,1 T. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah atau PP ini, beragam pro dan kontra muncul, baik yang menyoroti pemilihan kata "PSBB", substansi isi, hingga implementasi di masyarakat.

Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan bahwa dalam UU Keekarantinaan Kesehatan No. 6 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi, padanan yang lebih tepat bukanlah PSBB, melainkan Karantina Daerah. Hal ini didukung juga oleh pengamat hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyatakan, penerapan darurat sipil tak bisa dilaksanakan di tengah status darurat kesehatan masyarakat. Presiden tak perlu menggabungkan darurat sipil dengan darurat kesehatan masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19 (Aswan, 2020)⁷.

Gelombang protes ini juga bukan berasal dari para praktisi atau pakar saja, melainkan juga muncul dari para pengikut *channel* tersebut yang membubuhkan pada kolom komentar. Beberapa contoh yang disajikan oleh peneliti adalah di bawah ini :

Gambar 1.2. Komentar Netizen 1



(Akun youtube milik Sekretariat Presiden, 2020)⁸

Gambar 1.3. Komentar Netizen 2



bakul gulo 1 month ago

Hanya sebuah status tanpa solusi dan mekanisme hukum yg jelas,,LG bingung ya pak,,sama saya jg bingung gak ada kerjaan

(Akun youtube milik Sekretariat Presiden, 2020)⁸

Gambar 1.4. Komentar Netizen 3



Rubik123 1 month ago

Ini ada apa, dari kalimat dan gestur yang ada sepertinya situasi sedang darurat, Indonesia mau runtuh. Denger dimenit kesekian karena ada Corona padahal nyata2 Indonesia negatif Corona. Trus comot dana negara 405,1 T itu untuk apa. Tolong jangan mengada2. Jgn ngelawak. Tolong jangan sembrono semau gue jalankan negara !

(Akun youtube milik Sekretariat Presiden, 2020)⁸

Peneliti menyoroti beberapa hal yang begitu “asing” dan tidak wajar, utamanya dalam pemilihan kata dan cara penyampaian Presiden Jokowi. Hal ini akan dikaji dalam suatu analisis wacana kritis, dimana bahasa sebagai salah satu bentuk pesan (*message*) dalam komunikasi menyajikan makna tersendiri yang bisa jadi diterima mentah oleh penerima, ataupun menjadi suatu wacana khusus berarti yang layak untuk diuji kedalaman dan cakupan luasannya. Norman Fairclough (1995)⁹ membangun suatu model yang mengintegrasikan analisis wacana didasarkan linguistik wacana dan pemikiran sosial politik secara umum diintegrasikan dengan perubahan sosial. Wacana di sini merujuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih daripada aktivitas individu untuk merefleksikan sesuatu (Eriyanto, 2009)¹⁰.

Kata “wacana” berkembang di dunia modern khususnya politik kini seperti demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat sipil ataupun wakil rakyat. Kata “wacana” bukan semata berada dalam ranah ilmu komunikasi, melainkan digunakan dalam praktik ilmu sosiologi, linguistik, bahkan psikologi. Menurut Foucault (1972), wacana kadang kala sebagai bidang dari semua pernyataan yang kadang sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadang sebagai praktik regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan (Eriyanto, 2009)¹⁰.

Melihat fenomena Covid-19 yang begitu massif menyerang, diiringi banyaknya aturan dan pernyataan pemerintah yang begitu kontroversial, maka peneliti ingin mengungkap secara mendalam teks berupa Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia terkait PP PSBB. Peneliti mencoba menelaah pernyataan presiden menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk melihat struktur pesan dan makna. Terdapat bagian-bagian unik menyangkut pemilihan kata “Saya” dan “Pemerintah”, ketidakjelasan pemetaan pemberlakuan PP, hingga ketimpangan keberadaan PP yang menjadi sekedar himbuan tanpa kejelasan.

Fenomena yang diteliti bukanlah refleksi dari realitas dan bersifat independen, melainkan selalu berada pada hubungan dialektis yang berjalan aktif dan tidak terlepas dari praktik kekuasaan. Dimensi teoretis di sini berfokus pada aspek budaya (kulturalist) dengan memperhatikan ekspresi simbolik dari gagasan, makna, dan lain-lain; Penekanan jelas terasa pada aspek humanistik, kualitatif, subjektif. Perspektif teori komunikasi massa pada akhirnya merujuk pada klan sosial-kulturalis yang menekankan pengaruh faktor sosial pada produksi dan resepsi media dan fungsi-fungsi dari media dalam kehidupan sosial.

Dalam penelitian ini, pertanyaan yang ingin dijawab bukanlah bagaimana proses teks diproduksi melainkan bagaimana produk tersebut dipandang kritis. Diyakini bahwa teks sudah melewati fase panjang sehingga dapat ditampilkan dan menjadi konsumsi publik. Hal ini tidak terlepas dari sisi mikro, meso hingga makro dari teks.

Fokus utama dalam pemaparan ini adalah kekuasaan versi Michael Foucault yang terkenal berbeda dengan aliran Marxian ataupun Weberian. Kekuasaan bukan mengenai penguasa dan yang dikuasai, melainkan bentuk ke-netral-an dan orisinalitas. Kekuasaan tidak dimiliki dalam ruang lingkup dengan banyak posisi strategis yang saling terkait, melainkan lebih pada individu (subjek) dalam lingkup kecil. Kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan perhubungan sosial dan bukan bersifat represif, melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif seperti dalam perspektif Marxian, melainkan produktif dan reproduktif. Ia tidak terpusat, tetapi menyebar dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan. Beberapa pertanyaan penelitian yang difokuskan dari masalah ini antara lain (1) Bagaimana konstruksi kekuasaan Presiden Jokowi dalam Pidato “Indonesia Darurat Corona”? (2) Bagaimana situasi sosial dan politik memengaruhi pemahaman intertekstualitas teks Pidato “Indonesia Darurat Corona” Presiden Jokowi?

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori pendukung yang berkaitan dengan keberadaan dari pesan politik, hingga unsur kekuasaan (Michael Foucault). Yang pertama dibahas adalah komunikasi politik, tersusun atas kata “Komunikasi” yang merujuk pada hal yang dilakukan oleh manusia dalam pemberian pesan; dan kata “Politik” yaitu usaha warga negara untuk berdiskusi dan mewujudkan tujuan bersama. Komunikasi politik bukan hanya komunikasi langsung tatap muka, melainkan melalui media massa bahkan media sosial. Politisi mengusung isu publik dan menawarkan beragam kebijakan publik dalam sejumlah arena kampanye politik. Komunikasi politik di era dominasi media audio visual ini melahirkan sejumlah elit politik generasi baru. Dalam arena sistem politik demokratis, elit politik yang kian canggih memanfaatkan media massa sebagai arena membangun citra politik kepada publik (Ahmad, 2012)¹¹.

Politik diperbincangkan dari berbagai latar belakang dan kelas sosial dengan ragam intensitas dan persepsi yang berbeda. Kehadiran rezim politik dengan watak dan *performance* memperkuat persepsi manusia terhadap dunia politik. Ada yang beranggapan bahwa politik identik dengan manipulasi, kecurangan, dan kejahatan. Tetapi ada pula sebaliknya, yang beranggapan politik sejalan dengan perjuangan nilai bersama dan kepentingan publik demi memiliki derajat mulia dalam sejarah kehidupan manusia (Ahmad, 2012)¹⁰

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem dengan lingkungannya. Seorang komunikator atau aktor politik wajib memperhatikan beragam hal dan tidak hanya berfokus pada pesan verbal, melainkan juga non-verbal lantaran segala bentuk komunikasi oleh aktor politik digunakan demi mencapai tujuan tertentu; Komunikasi dilakukan juga oleh aktor non-politik (individu dengan hak pilih maupun kolumnis, kepada aktor politik) (McNair, 2003)¹².

Selain aktor pesan politik juga berperan penting. Tiga jenis kepentingan pesan politik menurut Davis V. J. Bell antara lain Kekuasaan yaitu menyangkut persoalan mempengaruhi orang lain dengan ancaman atau janji, penyuapan atau pemerasan sebagai alat tukar dalam kepentingan kekuasaan; Pengaruh yaitu berkaitan dengan upaya memanipulasi persepsi ataupun harapan tanpa sanksi. Komunikator menggunakan posisi dan reputasi positif untuk mempengaruhi melalui nasihat, dorongan, permintaan, peringatan; Otoritas atau pemberian perintah oleh penguasa yang sah dan memiliki hak untuk mempengaruhi (Dan Nimmo, 2005)¹³.

Konsep kekuasaan Foucault tidak membicarakan mengenai dominasi kelas atas ekonomi atau manipulasi ideologi seperti yang dikenal dalam Karl Marx, ataupun mengedepankan mengenai kharisma seperti pada Max

Weber. Kekuasaan Foucault tidak bergerak dalam operasi negatif yang represif dan koersif dari institusi pemilik kekuasaan, misalnya negara melainkan merujuk pada situasi strategis kompleks dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat relasi-relasi beragam dan tersebar seperti jaringan. Beberapa pokok pikiran yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

- (1) Kuasa secara esensial muncul dari relasi kekuatan yang mutlak dan apriori (tidak bergantung pada kesadaran manusia), sudah ada sebelum dominasi antar manusia. Kuasa bukan membicarakan mengenai hal yang bisa ditambah atau dikurangi atau dibagikan karena hanya melekat pada satu pihak saja. Ketika ada pemaksaan perpindahan kuasa, maka yang muncul adalah kekacauan, pertikaian, bahkan peperangan (Foucault, 1978)¹⁴
- (2) Kuasa bersifat menyebar dan tidak dapat dilokalisasi karena berkaitan dengan struktur dan relasi antarmanusia yang menentukan diri secara internal dan tidak tergantung pada sumber di luarnya
- (3) Kuasa dilihat sebagai mekanisme atau strategi penekanan praktik dan fungsi bidang tertentu yang dalam setiap relasi mengandung strategi perjuangan yang tidak saling menindih, tidak kehilangan kodrat yang unik dan tidak kacau karena mampu menentukan batas satu sama lain (Kebung¹⁵, 1997)
- (4) Kuasa berkaitan erat dengan pengetahuan. Tanpa praktik kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan dan tanpa bentuk; di sisi lain, relasi kuasa membuahkan pengetahuan (Rabinow, 1984)¹⁶. (
- (5) Kuasa muncul dari “bawah” dan tidak represif atau dominatif, apalagi intimidatif. Kuasa berjalan dalam regulasi dan normalisasi yang positif dan konstruktif (Dreyfus, Hubert & Rabinow)¹⁷
- (6) Kuasa berkaitan erat dengan resistensi yang tidak pernah ada dalam posisi eksterior dalam hubungan dengan kuasa (Sheridan, 1990)¹⁸.

Menurut Foucault, penguasa dapat bertemu dengan korban dan saling memberikan tanggapan ataupun reaksi dalam nuansa kebebasan dan saling menerima. Kuasa ada dalam aksi dan dipraktikkan terhadap aksi atau tindakan orang lain (Hoy, 1986)¹⁹. Cogburn dan Espinoza-Vasquez mengungkapkan bahwa media sosial semakin nyaman digunakan dalam usaha pencarian informasi dan menjadi ruang bebas para kandidat dalam melakukan manajemen citra politik. Kondisi tersebut menyatakan bahwa lingkup media sosial termasuk *front stage* atau panggung depan dimana setiap kandidat secara bebas mengunggah teks, foto, maupun video yang dianggap dapat meningkatkan dan atau mempertahankan citra.

Seperti yang diungkapkan Stanyer (2008)²⁰, Filimonov et al (2016)²¹, dan Simunjak (2017)²², bahwa media baru memberi ruang bagi politisi untuk menampilkan diri mereka tanpa perlu takut lagi ada filter yang dilakukan media berita. Kontrol yang dahulu ada di meja redaksi kini lenyap dan unggahan konten sepenuhnya ada di tangan kandidat. Mereka dapat dengan leluasa menerapkan manajemen citra politik, tanpa perlu mengandalkan para wartawan.

Yang terjadi kini adalah paparan yang dahulu mengalami filterisasi dan harus menyesuaikan dengan agenda setting media massa, kini akan dengan mudahnya sampai ke segmentasi yang dituju. Hal remeh temeh yang dianggap tidak memenuhi nilai berita atau menarik perhatian wartawan kini bisa dinikmati dan akhirnya diangkat menjadi sebuah kepentingan sendiri. Dari segi pengeluaran, pemilik berita (atau sosok yang ingin menjadikan dirinya berita) lebih hemat dari segi pengeluaran lantaran media sosial bisa digunakan secara cuma-cuma (Stanyer, 2008)¹⁸.

Tidak memungkinkan bila seorang kandidat menemui ratusan juta penduduk Indonesia satu persatu. Kandidat mampu membangun koneksi dengan masyarakat yang tidak pernah mereka temui, hanya dengan mengatur informasi yang akan dibagikan (walau nyatanya pengelola akun juga oleh pihak administrasi). Pada akhirnya, manajemen citra politik melalui media sosial juga sangat bermanfaat menggantikan komunikasi tatap muka (Stanyer, 2008²⁰; Filimonov et al, 2016²¹; Simunjak, 2017²²).

Dari sini terpapar jelas mengenai isu utama komunikasi massa yang ingin diangkat adalah mengenai Ruang dan Waktu. Manusia tidak lagi terpisah secara jarak dan dapat merasakan sensasi atau paparan berita dalam waktu yang sama. Perkembangan teknologi tidak dipungkiri menjadi sumber dari ini semua. Di satu sisi, efektifitas dan efisiensi dijunjung tinggi dan semakin baik, tetapi di sisi lain, yang terjadi malah membuat penyebaran informasi semakin sukar dikontrol karena terlalu banyak “tangan” dan “kepentingan” yang bermain di sana. Pandangan Marx menempatkan media dalam posisi sebagai salah satu alat revolusi sosial

METODE

Penelitian ini memiliki prosedur dalam pengumpulan data, sampai dengan analisis dan penarikan kesimpulan. Teks dimanfaatkan demi memenangkan pertarungan ide, kepentingan atau ideologi tertentu kelas tertentu. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, yang meletakkan dalam kesadaran bahwa teks atau wacana mempunyai pengaruh pada manusia dan selalu memuat kepentingan. Seluruh aktivitas dan pemaknaan simbolik dapat dilakukan dalam teks yang dipandang bukan realitas bebas nilai, melainkan selalu memihak. (Littlejohn dan Foss, 2009:183-217)²³.

Model dasar komunikasi massa ini adalah pesan media terbuka dan bermakna banyak dan ditafsir menurut konteks sosial dan budaya penerima tersaji dalam analisis teks (audio visual) diarahkan pada eksplanasi yang berorientasi menggambarkan diskursus sebagai bagian praktik sosial, dan menjelaskan determinasi diskursus terhadap struktur sosial serta efek reproduktifnya terhadap struktur tersebut. Baik efek yang berkaitan dengan memaparkan ataupun mengubah struktur sosial (Setiawan, 2011)²⁴.

Pada titik tertentu, teks media pada dirinya bersifat ideologis. Paradigma kritis berupaya melihat makna pesan yang diorganisasikan, digunakan, dan dipahami. Dalam ranah politik, analisis wacana kritis merupakan suatu praktek pemakaian bahasa, terutama politik bahasa. Karena bahasa merupakan aspek sentral dari penggambaran suatu subjek, dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya, maka aspek inilah yang dipelajari dalam analisis wacana kritis.

Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis wacana kritis Norman Fairclough mengutamakan wacana sebagai bentuk tindakan, dimana pihak di dalamnya menggunakan bahasa sebagai tindakan pada dunia dan bentuk representasi ketika melihat realitas. Pendekatan teoretis ini berpusat pada masyarakat (*society-centric*) dengan keyakinan bahwa media adalah refleksi kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Teori media adalah aplikasi khusus dari teori masyarakat yang lebih luas; faktor luar dari organisasi media yang dapat memengaruhi tindakan dan isi media.

AWK Fairclough mengutamakan hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial yang terbagi ke dalam struktur sosial, kelas, dan relasi sosial, dan atau pendidikan, sistem dan klasifikasi (Eriyanto, 2009)¹⁰. Adapun yang pertama adalah membahas mengenai analisis Teks. Teks bukan hanya menampilkan objek, melainkan bagaimana hubungan antar objek didefinisikan. Pada tahap analisis teks (mikrolevel) terdapat analisis representasi dan artikulasi dari pemikiran, kepentingan, dan ideologi yang dilekatkan pada teks. Teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, leksison dan tata kalimat. Tidak berhenti di sana, teks juga dianalisis koherensi dan kohesivitas bagaimana antarkata atau kalimat digabung sehingga membentuk sebuah pengertian (Eriyanto, 2009)¹⁰. Elemen dianalisis demi melihat masalah dari segi Ideasional dengan merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks; Relasi merujuk pada analisis konstruksi hubungan dan pemaparan bagaimana teks disajikan, formal atau informal; terbuka atau tertutup; dan Identitas yaitu konstruksi tertentu dari pemilik/ produsen bahasa dengan *audience/* konsumen teks; serta bagaimana personal dan identitas hendak ditampilkan.

Praktik ke-dua dalam AWK Fairclough adalah Praktik Diskursif. Konsumsi teks diartikan berbeda manakala konteks sosial berbeda karena ada kecenderungan sebuah teks dikonsumsi secara personal ataupun kolektif. Tidak berhenti pada proses ini, distribusi teks juga tergantung pada pola dan jenis teks serta institusi yang melekat pada teks bersangkutan (Eriyanto, 2009)¹⁰.

Yang terakhir (ke-tiga) adalah Praksis Sosial. Dimensi ini berhubungan dengan konteks di luar teks, seperti konteks situasi; praktik institusi media sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat dan budaya ataupun politik. Pemahaman intertekstualitas menjadi signifikan di sini. Peristiwa sosial memperlihatkan bahwa teks bukan semata-mata ada, melainkan juga membentuk praksis sosial.

Bahasa adalah praktik kekuasaan yang di dalamnya terdapat ragam kepentingan yang disajikan dalam bentuk teks tertulis ataupun audio visual. Wacana tidak terjadi sebagaimana adanya, melainkan melalui beberapa proses sampai diterima sebagai wujud kewajaran. Praksis wacana meliputi pembahasan dan pembuatan di pihak internal, berhubungan dengan organisasi, hingga dilempar ke masyarakat sosial. Dalam definisi Paul Ricoeur, wacana memiliki empat unsur, yaitu subjek yang menyatakan, kepada siapa disampaikan, dunia atau wahana yang mau direpresentasikan, dan temporalitas atau konteks waktu (Ricoeur, 1986)²⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis wacana kritis, Norman Fairclough, dibedah ke dalam tiga wilayah (teks) yang di dalamnya analisis wacana mikrostruktur membahas representasi, hubungan, dan identitas; analisis wacana mesostruktur, yang erat dengan produksi, konsumsi, dan reproduksi teks kekuasaan yang tidak seimbang; dilanjutkan dengan analisis wacana makrostruktur (sosiokultural) yang melihat dari aspek situasional, kelembagaan, dan sosial (Eriyanto, 2009)⁸. Dalam penelitian mengenai Pidato Presiden Jokowi mengenai PSBB, tidak semua elemen dari AWK Norman Fairclough cocok dan bisa dianalisis. Pemaparannya adalah sebagai berikut :

ANALISIS TEKS

Representasi

a. Representasi dalam Anak Kalimat

Aspek ini berhubungan dengan bagaimana seseorang, kelompok, peristiwa dan kegiatan ditampilkan dalam teks atau kalimat atau bahasa yang diucapkan oleh seseorang. Penggunaan bahasa dapat dilihat dari pilihan kosa kata dan tata bahasa yang digunakan (Eriyanto, 2009)¹⁰.

Ketika pidato ditampilkan, pemakai Bahasa dalam hal ini adalah Presiden Jokowi setidaknya dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu pada tingkat kosakata yang dipakai untuk menggambarkan fenomena yang menunjukkan satu set kategori; dan yang kedua adalah kosakata dipakai berhubungan dengan bagaimana peristiwa, seseorang, kelompok dikategorisasikan dalam suatu set tertentu. Yang menarik bukan mengenai pilihan kata yang bisa menghasilkan realitas berbeda, melainkan sebaliknya yaitu mengenai realitas yang sama dibahasakan secara berbeda (Eriyanto, 2009)¹⁰.

Fenomena Covid-19 merupakan musibah dunia yang dirasakan baik oleh negara miskin, negara berkembang, bahkan yang maju dan kaya sekalipun. Sempat timbul kontroversi mengenai bagaimana sebenarnya ini terjadi hingga prediksi sampai kapan wabah berakhir dan kehidupan normal kembali. Dalam hal pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020, peneliti menyoroti realitas Covid-19 merujuk pada keadaan yang gawat darurat dan membutuhkan pertolongan bukan oleh pemerintah tetapi melibatkan seluruh warga negara. Penggunaan nuansa populisme terasa keluar dari Teks Presiden Jokowi yaitu ketika ia menggunakan kata-kata seperti “Bapak/Ibu, Saudara Sekalian yang saya hormati”.

Keinginan dekat dengan rakyat dan mengutamakan keberadaan rakyat sebagai pendamping pemerintah kental terasa dalam pidato ini.

Dalam segi kosakata yang digunakan, peneliti melihat bahwa secara konsisten, Presiden Jokowi masuk dalam dua sisi sekaligus. Yaitu bagaimana ia menggunakan kata “Saya” yang menunjukkan kekuasaan, tetapi di sisi lain juga menggunakan kata “kita” sebagai wujud kedekatan. Pada pidato tersebut, Presiden Jokowi beberapa kali menggunakan kata “saya” dan sebagian menggunakan kata pemerintah, misalnya pada kutipan, “saya” telah memutuskan dalam Rapat Kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB)” dan “Para kepala daerah “saya” minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi”.

Penggunaan kata “saya” menunjukkan niat dan keinginan Presiden Jokowi menonjolkan posisi diri seorang pemimpin negara yang memiliki peran sebagai pengambil keputusan tertinggi. Penggunaan kata “saya” menegaskan kewenangan yang dimiliki Jokowi sebagai Presiden (*assert dominance*) dalam pembuatan kebijakan yang wajib berlaku bagi seluruh pihak. Terlepas dari itu, Presiden Jokowi juga menggunakan kata-kata yang baku dan formal. Hal ini mengedepankan keseriusan Presiden Jokowi dalam menganggulangi wabah yang sudah mendarah daging menandatangani status darurat di Indonesia.

b. Representasi dalam Rangkaian Anak Kalimat

Aspek representasi teks berhubungan dengan bagaimana dua kalimat atau lebih, disusun dan dirangkai. Hal ini juga berhubungan dengan bagian mana dalam kalimat yang lebih menonjol dibandingkan bagian yang lain, yang terpenting di sini adalah apakah partisipan dianggap mandiri atau ditampilkan memberikan reaksi terhadap teks berita. Teks di sini diasumsikan memiliki koherensi dan secara tidak langsung menegaskan ideologi pemilik bahasa (Eriyanto, 2009)¹⁰.

Pada pidato tersebut, sebelum membacakan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengatakan bahwa kita tidak bisa meniru pengalaman negara lain begitu saja karena setiap negara memiliki ciri khas masing-masing dalam banyak aspek. Bagian ini seakan menanamkan kepada audiens untuk tidak membandingkan kebijakan yang diputuskan pemerintah Indonesia (yang belum dibacakan) dengan kebijakan negara-negara lain karena Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri, sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang sesuai dengan ciri khas tersebut.

Pidato ini menekankan pada kebijakan untuk UMKM, pekerja informal, dan masyarakat lapisan bawah. Presiden Jokowi hanya menyampaikan satu kalimat mengenai pengendalian penyebaran COVID-19 tanpa penjabaran yang rinci, dan selebihnya menyampaikan tentang upaya untuk menjaga perekonomian di lapisan bawah. Hal ini menunjukkan citra pemerintah yang memperhatikan dan memprioritaskan masyarakat lapisan bawah, sekaligus menjawab keresahan dan kesulitan yang dirasakan masyarakat karena sudah diberlakukannya PSBB di beberapa wilayah pada saat itu.

Relasi atau Hubungan

Pembahasan mengenai representasi berhubungan dengan bagaimana seseorang, kelompok, kegiatan, Tindakan, keadaan ditampilkan dalam teks; sementara relasi berkaitan dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Media dipandang sebagai sebuah arena sosial, dimana semua kelompok, golongan, dan khalayak saling berhubungan dalam menyampaikan pendapat dan gagasan.

Dalam video tersebut, yang dilihat sebagai teks adalah pidato yang dibacakan oleh Presiden Jokowi, dengan masyarakat umum sebagai audiens utama yang melihat melalui platform media sosial Youtube. Dalam hal

konferensi pers tersebut, wartawan hadir di sana sebagai perwakilan audiens yang menanyakan hal yang berkaitan dengan pidato.

Wartawan memiliki hak atau keuntungan lebih dalam mencari berita sehingga bisa mendapatkan informasi dari tangan pertama, yang berarti langsung dari Presiden Jokowi. Hal ini yang membedakan keberadaan media massa konvensional dan Youtube. Dalam *platform* Youtube ini, audiens dapat mendengarkan langsung pemaparan dari Presiden yang berarti meminimalisir interpretasi oleh wartawan ataupun kepentingan media massa yang seringkali menimbulkan bias informasi.

Dalam memaparkan teks, membaca pidato, ataupun menjawab pertanyaan dari khalayak media, Presiden Jokowi menggunakan kata-kata yang baku dan formal. Ia memosisikan dirinya sebagai pemimpin, kepala negara, pengambil keputusan tertinggi. Relasi yang berusaha ia tekankan adalah dirinya yang merupakan Presiden memiliki kewenangan dan sudah melakukan tindakan untuk menangani situasi darurat di Indonesia.

ANALISIS WACANA (INTERTEKSTUALITAS)

Intertekstualitas adalah sebuah istilah dimana teks dan ungkapan yang dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya saling menanggapi dan salah satu bagian dari teks mengantisipasi lainnya. Semua ungkapan, baik tertulis maupun lisan dari semua jenis teks (laporan ilmiah, novel, dan berita) dibedakan oleh perubahan pembicara atau penulis, dan ditujukan dengan pembicara atau penulis sebelumnya. Semua tergabung dalam sebuah rantai komunikasi. Pernyataan atau ungkapan didasarkan oleh ungkapan lain dan berhubungan.

Fokus peneliti adalah bagaimana teks diproduksi oleh pihak produsen (dalam hal ini adalah Jokowi sebagai sosok Presiden); bersamaan dengan melihat bagaimana teks dikonsumsi dari pihak khalayak. Pemilihan kanal YouTube Sekretariat Presiden memberikan kontrol yang lebih dari pihak pemerintah untuk menyiarkan keterangan pers tanpa editan media massa. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari *framing* media massa dengan judul-judul dan keterangan yang dapat menggiring opini masyarakat dan berpotensi mengurangi keefektifan penyampaian maksud pidato.

Pola rutinitas media menjadi salah satu perhatian dalam dimensi *discourse practice*. Keterangan Pers ini muncul sebagai “jawaban” dari keresahan dan kesulitan masyarakat, terutama pekerja informal karena sudah diberlakukannya PSBB di beberapa wilayah. Pada video ini, Presiden Jokowi menunjukkan citra sebagai pemimpin negara yang bertanggung jawab, cepat tanggap, dan mempertahankan citranya sebagai Presiden yang suka blusukan, perhatian terhadap masyarakat lapisan bawah.

ANALISIS SOSIOKULTURAL

Analisis dalam tingkat ini didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media memengaruhi bagaimana wacana muncul dalam media tersebut, walaupun tidak langsung berhubungan dengan produksi teks, tetapi menentukan bagaimana sebuah teks diproduksi dan dipahami. Sosiokultural menggambarkan bagaimana kekuatan yang ada di masyarakat memaknai dan menyebarkan ideologi dominan dalam masyarakat (Eriyanto, 2009)¹⁰.

Teks tidak dapat dilepaskan dari ideologi masyarakat kapitalistik sebagai faktor penggerak utama di masyarakat. Kekuatan di masyarakat memaknai dan menyebarkan ideologi dominan kepada masyarakat yang bukan melalui hubungan langsung, melainkan dimediasi sebuah *discourse practice*.

1. Tingkat Situasional

Penyampaian Pidato Presiden Jokowi kental nuansa situasional, yaitu berada dalam sebuah konteks sosial dan mengenai bagaimana teks diproduksi dan dihasilkan dalam sebuah kondisi yang khas, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Pidato yang disampaikan oleh Presiden ini mengundang banyak sekali pro dan kontra, baik dalam pemilihan kata, moment, dan sindiran-sindiran lainnya yang berkenaan dengan pandemi. Hal ini memiliki tanggapan berbeda bila tidak se-lambat itu pemerintah mengambil sikap. Apalagi bila ditelaah, sudah banyak ejekan dan ocehan yang menyepelkan dari pemerintah akan hal-hal terkait Covid-19 tersebut.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi menunjukkan “kegagalan” dan taringnya, dalam mengatasi pandemi dunia, walau masih berguru dengan keadaan di negara tetangga. Ia menunjukkan dominasi dan kekuasaan dalam menghadapi permasalahan dan pengambilan kebijakan. Sebelum dikeluarkannya keterangan pers ini, sudah diberlakukan PSBB di beberapa wilayah dan banyak dari masyarakat yang mempertanyakan tindakan pemerintah terhadap perekonomian masyarakat yang terdampak. Keterangan ini seperti kunci yang menutup jempol dan mulut yang menyindir kinerja pemerintah, walau sekali lagi, dalam keadaan apapun, pro dan kontra pasti ada.

Peneliti tidak menggali lebih dalam mengenai pembuat teks Pidato tersebut, tetapi dapat dipastikan unsur emosional tidak terlepas di sana. Hal ini semakin didukung dengan ekspresi dan penekanan kata yang dipaparkan oleh Presiden Jokowi dalam penyampaian. Lirik mata, Gerakan tangan, hingga cara memegang teks menjadi suatu wujud mengenai produksi dan konsumsi teks yang saling tumpang tindih satu sama lain dengan kentalnya unsur subjektifitas.

Melalui Keterangan Pers ini, Presiden Jokowi merespon situasi penyebaran wabah COVID-19 dengan menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam penanganan dan pemerintah telah melakukan usaha-usaha, serta meregulasi kebijakan-kebijakan untuk mengatasi kondisi ini. Presiden Jokowi meyakinkan bahwa keadaan sudah terkendali dan berbagai skenario sudah disiapkan untuk mengatasi permasalahan yang sudah, sedang, dan mungkin akan terjadi.

Isi pidato menjadi wujud masalah baru, yaitu belum maksimalnya integrasi dari keseluruhan bagian dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Hal ini disoroti oleh peneliti bukan semata karena teks yang disampaikan melainkan sudah ada rasa tidak percaya dan ketidak sukaan lekat dengan pemerintah. Unsur historisitas tidak bisa dinafikan juga turut andil, menentukan bagaimana sebuah kebijakan dapat dipercaya ketika dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya.

2. Tingkat Institusional

Level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Faktor yang memegang peranan penting atas hal ini adalah ekonomi media yang berpengaruh terhadap wacana. Hal yang disajikan media, baik itu media massa dan media sosial memiliki target tersendiri, yaitu:

a. Menarik orang beriklan di media tersebut.

Dalam hal memposting keterangan pers melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, level institusional bagian pengiklan bisa dilupakan karena Presiden Jokowi tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntung finansial, melainkan keuntungan otoritas dan dominasi. Bukan mengenai uang yang bisa didapatkan ketika menyajikan sebuah konten, melainkan dampak sampingan berupa kredibilitas dan kepercayaan. Masyarakat kini bukan lagi mendapatkan informasi dari media massa televisi saja (yang dahulu begitu dicintai), tetapi juga mendapatkan informasi dari media yang lebih

canggih dengan keberadaan internet. Bahkan, media televisi pun tak segan menggunakan media digital ini sebagai sumber utama. Jadi sepak terjang Presiden Jokowi untuk menyampaikan kebijakan melalui platform media digital bukan kebetulan melainkan penuh tujuan. Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan mengenai kondisi negara kepada khalayak yang lebih luas dari segi geografis ataupun demografis, serta memiliki kontrol yang lebih dalam proses distribusi informasi krusial. Hal ini sangat mendukung posisinya. Bahkan bila dirunut lebih dalam, ia juga memiliki kanal sendiri yang menjadi ajang pertunjukkan sisi lain seorang Presiden, yaitu seorang Kepala Keluarga, Ayah, hingga “Mbah”.

b. Menjadi perhatian dari khalayak (disajikan dalam data dalam bentuk *oplak* atau *rating*). Dalam industri media massa konvensional, terdapat ukuran *rating* dan *share* sebagai tolak ukur keberhasilan yang menghasilkan keuntungan. Diungkapkan pada bagian atas bahwa Presiden Jokowi tidak membutuhkan iklan sebagai sarana mencari keuntungan, sama halnya dengan Presiden Jokowi yang tak memedulikan *rating* dan *share* sebagai penentu konten yang disajikan berikutnya. Platform yang ia gunakan tidak lebih dari kanal Youtube untuk menunjukkan eksistensi dan aktualisasi sebagai kepala negara yang tanggap terhadap kondisi negara dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan.

c. Persaingan antarmedia berdasarkan berita, adanya peristiwa sama yang diliput oleh banyak media, maka cara pesan tersebut diproduksi dipengaruhi kemauan media untuk unggul dibandingkan pesaing.

d. Bentuk intervensi ekonomi, misalnya modal atau kepemilikan terhadap media tersebut yang menyebabkan dalam penyajiannya tidak sensitif karena dijerat oleh jaring-jaring kapitalisme. Dalam pemaparan oleh Presiden Jokowi, jaring kapitalisme melebar dan menguat bukan melulu mengenai uang atau kekuasaan, tetapi mengutamakan kredibilitas dan memupuk rasa ketergantungan.

3. Tingkat Sosial

Norman Fairclough menegaskan bahwa sebuah wacana muncul karena perubahan dalam masyarakat, misalnya dalam hal budaya. Dalam tingkat situasional yang dilihat adalah level mikro, yaitu konteks saat peristiwa tersebut dibuat. Sementara dalam level sosial, yang menjadi fokus utama adalah aspek makro yaitu sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini yang menentukan siapa berkuasa serta nilai apa yang dominan di masyarakat, sampai akhirnya nilai dan pihak yang berkuasa tersebut dapat memengaruhi dan menentukan media.

Dalam pidato ini, Presiden Jokowi menunjukkan citra dirinya sebagai kepala negara yang bertanggung jawab dan sigap dalam menangani kondisi darurat. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi mempertahankan citranya yang “langsung turun ke lapangan” dan “blusukan” atau perhatian kepada masyarakat lapisan bawah, sikap-sikap yang membuatnya terpilih menjadi kepala negara. Mempertahankan identitas adalah hal yang layak dilakukan oleh pemimpin negara. Tetap dibutuhkan suatu ciri khas ketika julukan dan panggilan Presiden sudah tak lagi melekat pada nama. Hal ini dilakukan oleh Presiden Jokowi secara perlahan-lahan.

Di sisi lain, Presiden Jokowi yang seringkali dilihat sebagai sosok yang legowo, tenang, dan kurang tegas dapat bersikap dominan dan “galak” bila diyakini berhubungan dengan keselamatan orang banyak. Dalam menangani keadaan darurat, ia tidak pandang bulu dalam memberikan perintah, padahal ini juga yang menjadi celah kritik oposisinya. Kebijakan dijadikan senjata menyerang karena seringkali tidak sesuai antara pusat dan daerah. Namun pada pidato ini, Presiden Jokowi menegaskan kebijakan yang telah diputuskannya kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk diikuti. Hal ini tercermin jelas dalam kalimat “Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP, serta Keppres tersebut.”

Banyak warganet yang mengungkapkan kekecewaan karena Presiden Jokowi dipandang terlambat dalam merespon bahaya wabah COVID-19 pada kolom komentar di video tersebut, namun banyak juga warganet yang mengungkapkan apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah, bahkan mendoakan kelancaran jalannya kebijakan tersebut pada kolom komentar di video yang sama.

SIMPULAN

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan YouTube sebagai media yang digunakan menyampaikan pesan adalah suatu wujud yang pas dan tepat. Hal ini disebabkan pesan yang disampaikan tidak terdistorsi oleh editan media massa dengan judul-judul ataupun keterangan yang menggiring opini. Melalui YouTube, pemerintah dapat mengontrol distribusi informasi secara penuh dan dapat menyampaikan informasi kepada khalayak yang lebih luas dari segi geografis dan demografis.

Hal ini kiranya bersanding dengan keberadaan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang menganalisis dari mulai pembentukan sampai dengan penerimaan pesan tersebut di masyarakat. Pada Keterangan Pers yang diposting melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, dari segi pemilihan kata, Presiden Jokowi menunjukkan citranya sebagai kepala negara yang berperan dalam pengambilan keputusan tertinggi dan langsung sigap dalam penanganan keadaan darurat. Presiden Jokowi juga mempertahankan citranya sebagai pemimpin yang “langsung turun tangan” dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah melalui kebijakan-kebijakannya.

Presiden Jokowi menjawab keresahan masyarakat mengenai penanganan wabah dan perekonomian, serta menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan usaha-usaha dan menyiapkan skenario-skenario untuk segala kemungkinan. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan ciri khas tersendiri sehingga kebijakan yang diputuskan di Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara lain. Melalui pidato ini, Presiden Jokowi sekaligus merespon asumsi-asumsi mengenai kepemimpinannya yang kurang tegas dan banyaknya ketidaksesuaian antara pusat dan daerah dengan menegaskan kebijakan mengenai PSBB ini kepada kepala-kepala daerah untuk dilaksanakan sesuai UU yang telah ditetapkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal eksplorasi ide yang terkandung di dalam teks pidato dikarenakan pidato dan kebijakan yang digalakkan memang baru terjadi dan dibuat pada masa pandemi. Nuansa historisitas yang nota bene harusnya dominan belum bisa terlalu dimasukkan karena memiliki unsur situasional dan kontekstual yang jauh berbeda dengan keadaan sebelum pandemi. Alhasil, kebijakan pemerintah, pemilihan kata dalam pidato, bahkan moment menyampaikan dalam sebuah konferensi pers-pun seakan mentah dan tanpa persiapan.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ WHO, (2020). *Question and Answers on COVID-19* dalam [<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa>] diakses pada 8 April 2020
- ² Putsanra, Dipna Videlia. (13 Maret 2020). *Arti Lockdown yang Dilakukan Italia Karena Virus Corona COVID-19* dalam [<https://tirto.id/eEMf>] diakses pada 17 April 2020
- ³ Sheehan, Michael. (1996). *The Balance of Power: History & Theory*. London: Routledge.
- ⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Perkembangan Terkini Kasus Corona di Indonesia (Selasa, 31/3)* dalam [<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/31/perkembangan-kasus-corona-di-indonesia-selasa-313#>] diakses pada 14 April 2020
- ⁵ Bertens, K. (2001). *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- ⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

- ⁷ Aswan, Desi Triana (6 April 2020). *Pro dan Kontra PSBB ala Presiden Jokowi untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19* dalam [<https://makassar.tribunnews.com/2020/04/06/pro-dan-kontra-psbb-ala-presiden-jokowi-untuk-memutus-mata-rantai-penyebaran-covid-19?page=all>] diakses pada 14 April 2020
- ⁸ Sekretariat Presiden. (31 Maret 2020). *Keterangan Pers Presiden RI, Istana Bogor, 31 Maret 2020- "Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat"* dalam [https://www.youtube.com/watch?v=scie4bKc0Vw&ab_channel=SekretariatPresiden] diakses pada 11 April 2020
- ⁹ Fairclough, Nourman. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. New York: Longman Publishing.
- ¹⁰ Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Penerbit LkiS.
- ¹¹ Ahmad, Nyarwi. (2012). *Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik – Sejarah, Perspektif, dan Perkembangan Riset*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Zaman.
- ¹² McNair, Brian. (2003). *An Introduction to Political Communication*. New York: Routledge
- ¹³ Dan Nimmo. (2005). *Komunikasi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- ¹⁴ Foucault, Michael. (1978). *The History of Sexuality 1: An Introduction*. Terj. Robert Hurley. New York: Pantheon Books.
- ¹⁵ Kebung, Konrad. (1997). *Michel Foucault: Parrhesia dan Persoalan mengenai Etika*. Jakarta: Obor
- ¹⁶ Rabinow, Paul (ed). (1984). *The Foucault Reader*. New York: Pantheon Books.
- ¹⁷ Dreyfus, Hubert and Paul Rabinow. (1983). *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Chicago: The University of Chicago Press.
- ¹⁸ Sheridan, Alan. 1990. *Michel Foucault: The Will to Truth*. New York: Routledge.
- ¹⁹ Hoy, David (ed). 1986. *Foucault: A Critical Reader*. New York: Basil Blackwell.
- ²⁰ Stanyer, James. (2008) *Modern Political Communication*. Cambridge: Polity Press
- ²¹ Filimonov, Kirill, Uta Russmann, and Jakob Svensson. (2016). "Picturing the party: Instagram and party campaigning in the 2014 Swedish elections." *Social media+ society* 2.3.
- ²² Šimunjak, Maja. (2017). "(De-) personalization of mediated political communication: Comparative analysis of Yugoslavia, Croatia and the United Kingdom from 1945 to 2015." *European Journal of Communication* 32.5: 473-489.
- ²³ Littlejohn, Stephen W. dan Foss, Karen A. (2009). *Theories of Human Communication*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- ²⁴ Setiawan, Yuliyanto Budi. (2011). *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka*. Jurnal MAKNA 2 (1), hlm. 13-20.
- ²⁵ Ricoeur, Paul. (1986). *Idelogy and Utopia*. Dordrecht: Springer